

Multikulturalisme di Prancis: Perspektif Historis dan Produk Budaya Massa *

JOESANA TIAHJANI

Pengajar pada Program Studi Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Abstract

Multiculturalism as a way to view and respect differences is as a solidarity expression concerning minority. Each country has its own typical multicultural experience and practice. This essay is to describe how Franches have viewed the incoming immigrants as a minority group in France. The French historical perspectives of the Middle Ages, two of which are the societal group formation and the Declaration of Human Rights and Citizenship as the result of French Revolution in 1789 have great influence on the French mind set, including their way considering the immigrants. In line with it, the debates referring the concept of multiculturalism have been going on. The last part of the article elucidates the multicultural representation of the cultural identities in French cinemas and music with various ethnics, religions and cultures, including appearing stereotypes of the immigrants.

Keywords: imigrant, minority, multiculturalism, nasionalism, etnisity

Multikulturalisme: Konsep-konsep Dasar

Studi sosiologi dan antropologi tentang masyarakat majemuk (atau dalam konstruksi ilmu politik disebut *plural society*) selalu menggambarkan multikulturalisme sebagai "ideologi" dari sebuah masyarakat multikultural, yakni masyarakat yang terbentuk oleh

keberagaman etnik karena dukungan keragaman etnik atau kebudayaan dalam arti luas. Sejak awal, ideologi

* Tulisan ini pernah disajikan pada diskusi *Multikulturalisme Global, Mengenal Lebih Dekat Kebudayaan Dunia: Afirmasi terhadap Multikulturalisme*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mei 2007.

multikulturalisme diartikan sebagai suatu bentuk respek yang bersifat mutual dari satu etnik terhadap etnik lain, misalnya membedakan kekeluargaan agar etnik lain dapat mengekspresikan budaya etniknya, dan ekspresi tersebut merupakan salah satu kontribusi penting bagi pengembangan budaya suatu bangsa (Liliweri, 2005: 68).

Sebuah masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas beberapa komunitas budaya (pada umumnya etnik) yang memiliki beragam pemahaman yang khas tentang dunia, sistem nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat dan kebiasaan. Dalam pengertian yang lebih luas, komunitas budaya dalam konteks multikultural mencakup pula komunitas tertentu yang memiliki keanekaragaman kebiasaan budaya dan atau memiliki beberapa subkultur (kaum remaja, masyarakat urban, kaum homoseksual dan komunitas dengan gaya hidup alternatif lainnya). Pandangan yang menganggap bahwa masyarakat seharusnya menyambut keragaman budaya tersebut adalah suatu pandangan multikultural.

Multikulturalisme merupakan cara bagaimana memandang dan menyikapi perbedaan. Keberagaman atau pluralitas budaya merupakan kenyataan yang umum ditemui di seluruh dunia. Pada umumnya, keberagaman ini disikapi dan dikonseptualisasikan berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari satu zaman ke zaman lainnya.

Istilah-istilah atau konsep-konsep dasar yang sering dijumpai dalam pembahasan tentang pluralitas adalah¹:

- *Melting pot*, yakni bercampurnya manusia dengan latar belakang etnik yang berbeda, kemudian "meleleh" menjadi manusia baru. Di sini muncul apa yang disebut *mainstream*, unsur etnik yang dominan yang ciri-ciri khasnya mewarnai kelompok manusia baru tersebut;
- *Salad bowl*, yang mengakomodasi kontribusi berbagai macam budaya untuk memperkaya suatu kebudayaan tertentu, tetapi semuanya tetap diletakkan dalam suatu kerangka budaya nasional yang dominan;
- *Cultural pluralism*, yang membedakan antara ruang publik yang homogen, tempat semua warga bersosialisasi dan berpartisipasi dalam politik, dan ruang pribadi yang penuh keragaman budaya berdasarkan latar belakang masing-masing warga.

¹ Disarikan dari bahan kuliah *Multikulturalisme dalam Sastra* yang diampu oleh Prof.Dr. Melani Budianta

- *Multiculturalism*, yang dijiwai oleh semangat menghormati perbedaan serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dalam situasi yang pluralistik, melihat perbedaan bukan sebagai sesuatu yang ditakuti, melainkan justru diterima dengan baik.

Sebagai sebuah ekspresi solidaritas terhadap kelompok-kelompok minoritas, serta sebagai sebuah semangat untuk memberi ruang yang lapang bagi keberadaan pluralisme, multikulturalisme tidak menetapkan batas-batas bagi ideologinya sendiri, namun akan selalu terbuka, luwes, dan mampu mengakomodasi perbedaan dalam kemajemukan. Berbagai komponen budaya yang membentuk kemajemukan tersebut seharusnya tidak dipahami sebagai esensi-esensi yang statis, melainkan sebagai rangkaian proses yang dinamis. Hubungan antarkomponen budaya tidak selalu harus harmonis dan selaras. Multikulturalisme justru menuntut kesiapan mental kita untuk berhadapan dengan bentuk hubungan yang berpotensi atau yang menjelma menjadi konflik dari berbagai komponen budaya, dan belajar mengelola konflik dengan toleran dan bijaksana.

Setiap negara berbeda-beda dalam menerapkan multikulturalisme. Hal ini erat kaitannya dengan latar

belakang sejarah dan konteks budaya masing-masing negara. Prancis adalah salah satu negara di dunia dengan identitas nasional yang berasal dari keragaman dan kemajemukan. Prancis mempunyai pemaknaan yang khusus tentang multikulturalisme, yang berhubungan baik dengan sejarah pembentukan bangsa maupun dengan citraan yang terbentuk dari budayanya. Pertanyaannya: bagaimanakah sejarah Prancis memperlihatkan kemajemukan etnik dan budaya di negeri itu?

Sistem Monarki, Lahirnya Revolusi Prancis, dan Konsep Negara-Bangsa

Tanpa melupakan arus migrasi temporer yang terjadi sejak Abad Pertengahan, Prancis telah menjadi negara tujuan kaum migran sejak paruh kedua abad ke-19. Namun, sampai dengan tahun 1945, tidak ada politik imigrasi dalam arti yang sesungguhnya. Baru pada 2 November 1945, dikeluarkannya ordonansi mengenai imigrasi menjadi pelambang awal campur tangan pemerintah Prancis dalam hal ini. Sejak itu, selama berpuluh-puluh tahun kemudian ordonansi ini menjadi teks rujukan. Jika arus perpindahan penduduk telah terjadi sejak lama, mengapa pemerintah Prancis terkesan lambat menangani hal itu? Untuk dapat

menjawab pertanyaan tersebut, penting kiranya memahami sejarah dan konsep pembentukan bangsa Prancis.

Sejarah Prancis sebelum Revolusi Prancis tahun 1789 ditandai oleh tradisi monarki yang panjang dengan kisah-kisah kejayaan. Raja-raja Prancis tidak ragu berperang demi mempertahankan dan mengembangkan pengaruh dan kekuasaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Prancis. Charlemagne adalah raja besar Prancis yang berhasil melakukan ekspedisi-ekspedisi militer (pada akhir abad VIII) dan menaklukkan hampir seluruh Eropa kristiani sehingga Prancis pernah memiliki wilayah sangat luas, melebihi batas-batas wilayahnya saat ini. Dinasti Capétiens berkuasa selama lebih dari tiga abad (987-1328) dan berhasil mengembangkan wilayah kerajaan dan memperkecil kekuatan para 'seigneur' (tuan tanah), tatkala Prancis masih menganut sistem feodalisme. Salah satu peperangan terpanjang yang juga tercatat dalam sejarah Prancis adalah perang antara Prancis dan Inggris yang berlangsung selama hampir seratus tahun pada paruh pertama abad XIV. Peperangan lain, kecil maupun besar, kerap kali terjadi untuk mendapatkan supremasi dalam kerajaan serta untuk mengurangi pengaruh dan kekuatan kerajaan

Eropa lainnya. Masa kekuasaan "Raja Matahari" (*Le Roi Soleil*) Louis XIV (1661-1715), yang diwarnai dengan ambisi pribadinya untuk memperluas wilayah Prancis dan hasratnya untuk meninggalkan kenangan akan seorang penguasa besar, merupakan rangkaian panjang peperangan. Dengan semboyannya "Negara adalah Aku" (*L'État, c'est moi*), pemerintahan Louis XIV menandai puncak absolutisme monarki.

Menjelang Revolusi 1789, rakyat Prancis tidak bebas (*libre*) dan tidak sederajat (*égaux*) di hadapan hukum dan undang-undang monarki. Pada masa itu, masyarakat Prancis cenderung menjadi masyarakat kelas dengan pembagian sebagai berikut: golongan yang berdoa atau kaum agamawan, golongan bangsawan, dan golongan pekerja atau rakyat jelata. Pembagian golongan yang sesungguhnya merupakan warisan dari Abad Pertengahan ini menjadi dasar struktur hierarkis yang mempertentangkan golongan yang memiliki hak-hak istimewa dan mereka yang tidak memilikinya. Golongan ketiga, satu-satunya golongan yang tidak memiliki hak istimewa sama sekali, merasa lelah serta muak dengan sistem pemerintahan yang telah membelenggu kemerdekaan nasib mereka. Hingga pada 14 Juli 1789, rakyat beramai-ramai menyerbu

penjara Bastille di Paris, dengan tujuan semula merebut persenjataan para tentara untuk mempertahankan diri, ternyata kemudian berhasil merebut dan menumbangkan lambang kekuasaan golongan dengan hak-hak istimewa tersebut. Tepat setahun kemudian, 14 Juli 1790, rakyat Prancis berbondong-bondong datang ke ibu kota dengan tujuan merayakan setahun runtuhnya penjara Bastille, dan pada saat itu mereka menyatakan tekad untuk bersatu melawan musuh revolusi atau para tiran. Tanggal 14 Juli 1790 inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Nasional Prancis.

Dengan dasar pemikiran ini, mudahlah bagi kita memahami prinsip dasar dan arti penting Revolusi Prancis. Revolusi Prancis 1789 tidak membentuk negara Prancis, yang telah lama ada sebagai negara kerajaan, melainkan menjadi momentum bagi lahirnya sebuah negara-bangsa. Penyerbuan ke penjara Bastille di Paris pada 14 Juli 1789 adalah simbol dari penghapusan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh sekelompok orang dan runtuhnya sistem monarki absolut yang telah berlangsung lama. Revolusi Prancis telah melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen*). Pasal 1 dari Deklarasi itu menyatakan bahwa

menjadi warga negara Prancis tidak memandang perbedaan asal-muasal, ras, maupun agama (*sans distinction d'origine, de race ou de religion*). Dalam perkembangannya, prinsip ini memiliki signifikansi pada pembatasan konsep kebangsaan Prancis, yakni wilayah di mana rakyat berbicara bahasa Prancis dan keinginan untuk hidup bersama menjadi landasan sehari-hari, seperti yang diungkapkan kemudian oleh negarawan Ernest Renan (1882) "*plébiscite de tous les jours*" (*daily referendum about the willingness to live together*).

Bahasa Prancis, yang difungsikan sebagai alat dan bahasa pemersatu, menjadi sangat penting bagi konsep kewarganegaraan Prancis. Dialek regional mulai terhapus perlahan-lahan. Sebagai catatan, pada masa Revolusi Prancis 50% orang Prancis sama sekali tidak berbahasa Prancis.

Nasionalisme, Etnisitas, dan Multikulturalisme

Perjalanan sejarah selanjutnya memperlihatkan bahwa niat dan tekad rakyat Prancis untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dan mempertahankannya telah mempengaruhi ideologi dan landasan pikir orang Prancis. Revolusi 1789 memang telah menghapuskan monarki absolut, namun diperlukan lebih dari separuh abad bagi Prancis untuk konsisten pada

bentuk negara dan sistem pemerintahan republik. Setelah Revolusi Prancis, negara ini mengalami beberapa kali peralihan konstitusi dan sistem pemerintahan: Republik I (1792-1804), Kekaisaran I (1804-1814), Republik II (1848-1852), Kekaisaran II (1852-1870), Republik III (1870-1940), Republik IV (1944-1958), Republik V (1958-sekarang). Salah satu faktor penyebab utamanya adalah perbedaan pendapat dan perselisihan yang kerap terjadi dalam merumuskan dan menginterpretasikan kekuasaan, khususnya pada masa Republik I sampai dengan Kekaisaran II.

Dengan berbagai pemikiran dan gerakan reformasi, Periode Republik III menjadi penting di dalam sejarah Prancis. Beberapa negarawan seperti Jean Jaurès, Jules Ferry, dan Clémentineau bertekad membangun Prancis sebagai negara modern, kuat, sekaligus dermawan, yang ditandai penduduknya dapat hidup dalam kebebasan dan keadilan. Dalam hal tatanan politik, sejak 1875, lembaga legislatif yang berkuasa membuat undang-undang dipisahkan menjadi dua dewan (*Sénat* dan *Chambre des députés*) dan para anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kepala negara adalah presiden Republik yang dipilih oleh dewan legislatif. Di bidang pendidikan, Prancis mulai menganut tiga (3) prinsip dasar yang terus dipertahan-

kan sampai saat ini, yakni *wajib, cuma-cuma*, dan *sekuler*. Sementara itu, seiring dengan perkembangan dan laju industrialisasi yang terjadi di negara ini, sejak saat itu, dimulailah kontak bangsa Prancis dengan tenaga kerja-tenaga kerja asing yang berdatangan ke kota-kota industri di Prancis dan kemudian menetap di situ.

Pada masa awal industrialisasi di Prancis di paruh kedua abad XIX, yang paling banyak mengisi kekosongan tenaga kerja di Prancis adalah orang-orang dari negara lain di Eropa, yakni dari Belgia dan Italia. Masalah ras dan etnis belum terlalu mengemuka pada masa itu, karena para pendatang relatif dekat kebudayaannya dengan budaya Prancis. Masalah yang berkaitan dengan etnisitas dan identitas budaya mulai dirasakan seiring kedatangan tenaga kerja asing dari luar Eropa, khususnya tenaga kerja dari negara-negara Maghribi, Afrika Utara, yang mulai berdatangan ke Prancis pada era kejayaan ekonomi Prancis pasca Perang Dunia II sampai menjelang krisis minyak tahun 1973.²

² Era pasca Perang Dunia II di Prancis ditandai oleh proses modernisasi dan laju perubahan yang sangat cepat. Kemajuan spektakuler di bidang ekonomi antara tahun 1950an dan tahun 1970an membuat ekonom Jean Fourastié menyebut masa itu sebagai *Les Trente Glorieuses* atau *Tiga Puluh Tahun yang Jaya*.

Sejak tahun-tahun pertama gelombang imigrasi dari negara-negara non-Eropa, para pembuat kebijakan di Prancis telah memperhatikan bahwa tenaga kerja asing tersebut berbeda dari tenaga asing yang ada sebelumnya, dalam arti bahwa sulit bahkan mustahil bagi mereka untuk berasimilasi dengan masyarakat Prancis. Uniknya, pandangan ini disetujui bersama, baik oleh para politisi partai-partai konservatif kanan, maupun oleh politisi partai-partai kiri Prancis, beserta para pengikutnya. Bagi para politisi dan penganut partai ekstrem kanan Prancis, imigran-imigran baru tersebut tidak dapat diterima kehadirannya karena akar budaya dan asal-usul mereka terlalu jauh dari perbatasan wilayah etnis dan budaya Prancis. Meskipun kaum Republikan menolak definisi etnis dan budaya dari komunitas Prancis, mereka mengakui bahwa diperlukan tingkat kesepahaman budaya untuk berintegrasi dengan masyarakat Prancis. Pemikiran dari kedua haluan politik Prancis itu memperlihatkan penegasan terhadap gagasan persatuan dan kebangsaan Revolusi Prancis serta pengabaian terhadap legitimasi keragaman budaya. Cendekiawan dan aktor politik Prancis secara konsisten mengajukan argumentasi bahwa, menurut sejarah, institusi

politik dan sosial Prancis telah berhasil menjadikan kaum imigran orang Prancis. Sejak awal Republik III, sesuai juga dengan gagasan kebebasan dan persamaan Revolusi Prancis, negara tidak mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan etnis asal mereka. Kategori ras dan etnis dihindari untuk mencegah diskriminasi. Hal tersebut diresmikan dalam konstitusi Prancis. Gagasan tentang etnisitas akan mengembalikan ingatan kolektif masa lampau pada diri orang Prancis pada zaman kegelapan saat negeri mereka masih dihuni kelompok-kelompok yang saling berperang untuk menguasai wilayah. Sebaliknya, nasionalisme adalah sesuatu yang positif dan berjalan sepaham dengan perkembangan sejarah. Identitas sebagai *orang Prancis* adalah kewarganegaraan dan bukan etnisitas tertentu. Dengan demikian jelaslah bahwa etnisitas bertentangan dengan gagasan nasionalisme.

Setelah memahami landasan pikir orang Prancis yang mempertentangkan etnisitas dengan nasionalisme, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dan dalam hal apa gagasan tentang multikulturalisme tumbuh di negara tersebut? Pertama-tama, patut diingat bahwa salah satu faktor penentu dalam konsep kewarganegaraan di Prancis adalah integrasi, yang berdasar pada kebijakan-

kebijakan dalam rangka menciptakan identitas bersama, serta internalisasi pada diri setiap individu akan sebuah budaya bersama. Menurut B. Villalba³, integrasi merupakan hasil dari dua keinginan, yakni: keinginan negara untuk menciptakan sebuah budaya bersama bagi semua warganya, dan keinginan komunitas warga yang tinggal di negara tersebut untuk mengakui legitimasi dari budaya bersama itu. Setiap negara demokratis seharusnya dapat menyanggah segala bentuk partikularisme (etnis, ekonomi, sosial, agama, budaya).

Sementara itu, setiap warga negara semestinya mendahulukan dimensi universal dari partikularisme identitasnya. Ia adalah warga negara sebelum menjadi anggota komunitas atau kelas sosial. Dengan demikian, sebuah negara demokratis, dengan sendirinya, bersifat multikultural berdasarkan penghormatan dan penerimaan warga negaranya, beragam populasi yang berasal dari keragaman daerah asal, asal kebangsaan (imigran, non-imigran, generasi kedua dan selanjutnya dari kaum imigran), maupun agamanya (Islam, Katolik, Protestan, atau Yahudi).

Tidak mudah untuk merumuskan konsep multikulturalisme dalam konteks negara-bangsa Prancis. Cendekiawan-cendekiawan Prancis dari berbagai disiplin ilmu tidak kunjung usai beradu argumentasi tentang masalah tersebut. Para pembela gagasan republikan bahkan tidak melihat jalan tengah sebagai jalan keluar bagi perdebatan yang menyangkut pluralisme dan asimilasi. Pertanyaan yang selalu muncul adalah bagaimana mensosialisasikan identitas nasional sebagai monoidentitas dari pembentukan kembali beragam identitas lingkaran luar (*périphériques*) yang ada. Negara memegang peranan penting dalam hal ini. Masalahnya bagaimana menciptakan struktur perantara bagi individu untuk berasimilasi dengan negara. Peleburan seharusnya terjadi atas dasar prinsip "individualis dan egaliter", menurut sosiolog E. Todd.⁴ Ia melancarkan kritik tajam mengenai proses asimilasi kaum imigran, yang dikatakannya melalui "destruksi sistem antropologis" karena secara simplistik mereka diminta menjadi amnesia, memenggal ingatan mereka untuk melupakan siapa dan dari mana asalnya. Salah seorang dari sedikit

³ B. Villalba. *Chapitre 2 - Les incertitudes de la citoyenneté*. Université Catholique de Lille. Mai 2006.

⁴ Todd E., *Le destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales*, Paris, Seuil, 1994, 391 p. (*L'histoire immédiate*).

ilmuwan yang menunjukkan sikap terbuka dan memisahkan diri dengan jelas dari kaum nasionalis republikan dalam perdebatan mengenai kaum imigran adalah M. Wieviorka. Meskipun terdapat ambiguitas dalam sudut pandangnya mengenai etnisitas sebagai fenomena sosial, tampak ketajaman dalam pendekatannya dalam krisis model republikan.⁵

Bagi Wieviorka, krisis ini justru merupakan titik awal dari segenap pemikiran tentang multikulturalisme. Menurutnya, skema republikan tidak jelas lagi, tema persamaan dan persaudaraan (*égalité et fraternité*) tidak berfungsi lagi, sistem pendidikan tidak lagi mengilhami, pengangguran dan kekerasan urban meningkat, begitu pula marginalitas dan penolakan. Dalam konteks aktual, model Prancis tidak dapat lagi "mengidentifikasi diri pada universalitas" karena universalisme abstrak mengingkari perbedaan. Ia anggap perlu dan mendesak pengkajian ulang, seraya mengusulkan penataan institusional dan politik. Penataan itu diperlukan tidak saja untuk menarik garis batas dari polarisasi-polarisasi identitas yang

terlalu kuat namun juga untuk menghindari tirani mayoritas. Dalam berbagai tulisannya, termasuk artikelnya berjudul "*Is multiculturalism the solution?*", hipotesis Wieviorka mengemukakan multikulturalisme merupakan solusi terbaik yang dapat mendamaikan universalisme dan partikularisme, bentuk aspirasi terhadap persamaan dan hak akan keberagaman.

Sampai sejauh ini, Prancis dengan prinsip negara bangsanya, tampak kurang berhasil memberikan gambaran multikulturalisme yang berhasil, seperti model *salad bowl* pada multikulturalisme anglo-sakson. Sebaliknya, yang terjadi tetap bertahan pada skala *cultural pluralism* yang memisahkan dengan tegas batas antara ruang publik yang homogen dan ruang pribadi masing-masing individu atau komunitas. Afirmasi ini bisa saja tidak sepenuhnya benar bila kita memperhatikan beberapa aspek pada pranata politik Prancis. Sistem pemilihan umum, pada tataran legislatif dan eksekutif, dilaksanakan secara umum, bebas, dan terbuka dalam nuansa demokrasi. Sejak Republik IV, tidak ada lagi diskriminasi gender dalam pemberian hak suara dalam pemilu. Dan siapa pun, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dalam wilayah kedaulatan Prancis.

⁵ Otayek, René. *Le Débat français sur la Citoyenneté et Ses Implications en terme de Perception de l'Autre*. Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux Centre d'Etudes d'Afrique Noire.

Bagian ini menutup uraian tentang multikulturalisme di Prancis dalam perspektif historis. Namun, untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai dimensi multikultural di negara segi enam tersebut, perlu mengamati perwujudannya dalam berbagai produk budaya sebagai sarana dan media paling kreatif untuk mengungkapkan identitas plurietnis dan pluribudaya. Pembahasan akan dibatasi sejak periode pasca Perang Dunia II, saat Prancis bersinggungan langsung dengan masyarakat pendatang dari luar Eropa.

Representasi Identitas Budaya Multikultural dalam Sinema dan Musik

Prancis pasca Perang Dunia II ditandai oleh modernisasi dan laju ekonomi yang pesat. Pendapatan nasional dan daya beli masyarakat meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat. Charles de Gaulle dengan partai politiknya di pucuk pemerintahan Prancis mengibarkan modernitas sebagai arah politiknya. Arah politik Prancis serta perekonomian internasional menegaskan transformasi struktur ekonomi Prancis dari sistem ekonomi agraris yang telah dilaksanakan selama berabad-abad menjadi sistem ekonomi industrial. Hal ini menyebabkan pengalihan tenaga kerja dari sektor primer

menuju sektor industri dan jasa. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan negara ini membuka pintunya lebar-lebar kepada tenaga kerja pendatang dari berbagai negara.⁶

Perkembangan ekonomi dan transisi dari masyarakat agraris rural menjadi masyarakat industrial urban telah menciptakan fenomena baru, yakni wacana modernitas dan konsumerisme. Dua hal ini menjadi tema atau latar yang sering dijumpai dalam karya seni di Prancis selain wacana pascakolonial, masalah identitas, aspek lokal-global, kesenjangan antargenerasi, dan lain-lain.

Khusus dalam konteks kajian pascakolonial, harus digarsibawahi pentingnya konsep frankofoni (*'la francophonie'*), yang pengertian dasarnya murni merupakan ciri budaya dan bertolak semata-mata dari penggunaan bahasa Prancis. Secara lebih umum, istilah frankofoni digunakan untuk merujuk pada komunitas global pengguna bahasa Prancis, dalam berbagai tingkatan (bahasa resmi, salah satu bahasa resmi di antara bahasa-bahasa lainnya, bahasa komunikasi, bahasa karya seni). Istilah ini menjadi ambigu, dalam artian

⁶ Tjahjani, Joesana, *Perubahan Sosial-Budaya pada Era Trente Glorieuses di Prancis dalam Prancis dan Kita : Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*, Jakarta, Penerbit Wedatama Widya Sastra, 2003.

bermakna ganda, bila kita merujuk pula pada konsep geopolitik; negara-negara yang membentuk komunitas frankofoni sebagian besar adalah negara-negara (bekas) jajahan Prancis. Istilah ini memperoleh definisinya sejak akhir dekolonisasi Prancis dan, oleh sebagian pengamat, dianggap sebagai perpanjangan kontak budaya antara Prancis dan bekas negara jajahannya. Sebagian malah menyebutnya sebagai bentuk neo-kolonialisme, dan melalui hal itu Prancis mempertahankan hegemoni budayanya.

Tulisan ini tidak akan permasalahan beragam sudut pandang yang menyangkut frankofoni, tetapi akan lebih menyorotinya sebagai salah satu latar dalam khasanah seni Prancis.

Sejak periode pasca Perang Dunia II sampai saat ini, tercatat hampir setengah dari seluruh jumlah imigran di Prancis berasal dari Afrika, terutama Afrika Utara dari negara-negara maghribi (Aljazair, Maroko, Tunisia). Dengan latar belakang agama dan budaya Islam yang kental, kehadiran imigran maghribi dipandang paling sulit dalam proses asimilasi dan integrasi di tanah air kedua mereka. Di sisi lain, kehadiran mereka memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap keberadaan dan keberagaman budaya Prancis. Dalam bidang sinema misalnya, selama 3 dasawarsa sejak kedatangan kaum

imigran Maghribi, tercatat lebih dari 100 judul film dibuat oleh atau hasil kerja sama dengan sineas Maghribi. Demikian pula film-film yang bertemakan masalah kaum imigran.

Sebagai medium untuk membangun subyektivitas dan identitas, pada umumnya sinema Barat bekerja untuk memproduksi (kembali) hierarki etnis yang dapat dijumpai dalam supremasi budaya dan identitas kulit putih metropolitan, melalui ketiadaan atau marginalisasi suara dan perspektif dari permasalahan sang liyan.⁷

Sinema Prancis, seperti halnya budaya Prancis pada umumnya, berhasil memperlihatkan warisan kolonialnya, khususnya dalam hal pembentukan masyarakat multikultural dan multietnis kontemporer. Selama dasawarsa 1990, sejumlah film Prancis telah menampilkan potret dari diaspora warga kulit hitam, Asia, dan Arab di Prancis. Film terbaik pada Festival Film Cannes 1995 dan memperoleh penghargaan piala César tahun 1996, *La Haine* (Kebencian) secara signifikan memberikan peluang terhadap pemahaman hegemoni (kulit putih, kelas menengah, republikan) tentang "keprancisian" melalui latar alienasi bersama dari remaja kulit putih, kulit hitam, dan maghribi di

⁷ Tarr, Carrie. "French Cinema and Post-Colonial Minorities" in *Post-Colonial Cultures in France*, 1997.

pemukiman pinggir kota Paris. Para pembuat film independen kerap ingin mengkritik kultur dominan dan mengembangkan subjektivitas dan identitas alternatif.

Daerah pemukiman pinggir kota besar, dalam bahasa Prancis disebut *banlieue*, relatif menjadi dekor yang potensial bagi sineas Prancis untuk menggambarkan realitas multikultural. *Banlieue* mulai tumbuh dan berkembang di Prancis pada tahun 1960an sebagai alternatif hunian bagi warga pendatang, yang relatif miskin dan tak mampu membayar sewa tempat tinggal di pusat kota. Sampai saat ini, *banlieue* dengan apartemen-apartemen murah digambarkan sebagai representasi dari kehadiran kaum imigran. Film-film Prancis biasanya menampilkannya melalui stereotip-stereotip permasalahan yang muncul pada komunitas imigran, mulai dari masalah pengangguran, kekerasan, konsumsi alkohol dan obat-obat terlarang, percintaan pasangan plurietnis, sampai ungkapan identitas alternatif seperti kreasi dan penggunaan bahasa prokem, grafiti, dan musik remaja.

Banlieue juga merupakan lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya ragam musik alternatif. Dua ragam musik, Rap dan Raï, akan menjadi ilustrasi dalam tulisan ini untuk menggambarkan aspek multikultural dari dunia musik Prancis.

Musik Rap hadir untuk pertama kalinya di Prancis pada tahun 1982⁸, saat wartawan Bernard Zekri kembali dari New York membawa berita kesuksesan jenis musik ini dan kemudian berhasil meyakinkan stasiun radio Prancis Europe 1 untuk mendanai tur musim gugur dengan penampilan 3 (tiga) unsur budaya hip-hop: rap, seni grafiti, dan *breakdance*. Rap kemudian dipopulerkan melalui acara mingguan televisi TF1 dan acara pertunjukan *Rapline* yang disiarkan oleh stasiun televisi M6 pada dasawarsa 1990. Penggemar musik Rap terutama berasal dari kalangan remaja karena iramanya yang dinamis.

Kaum remaja *banlieue* menggemarnya karena liriknya pada umumnya merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap rasisme dan kebijakan diskriminatif dalam konteks masyarakat industrialis urban. Lirik-lirik berikut dapat menggambarkan kekecewaan dan protes mereka: "*Ma seule patrie est mon posse*" ('Satu-satunya tanah airku adalah sakuku'), "*Brûle l'état policier en premier*" ('Bakar negara polisi'), "*J'aurais pu croire en l'Occident, si/Tous ces pays n'avaient pas eu de colonies/Et lors de l'indépendance ne les avaient pas*

⁸ Cannon, Steve. *Panama City Rapping : B-boys in the banlieues and beyond in Post-Colonial Cultures in France*, 1997.

découpées comme des tartes/Aujourd'hui il y a des guerres à cause des problèmes de cartes » ('Aku mungkin akan mempercayai Barat/Jika negara-negara itu tidak menjajah/Jika setelah merdeka negara jajahan tak dibagi-bagi seperti kue tart/Saat ini perang terjadi karena memperebutkan wilayah').

Dalam perkembangannya, musik ini menjadi semacam ikon bersama bagi kaum tertindas, tidak hanya golongan kulit berwarna tetapi juga kaum miskin kulit putih yang sering dijumpai menetap di *banlieue*. Hal terakhir membedakan Rap di Prancis dengan Rap dari negara asalnya.

Jenis musik lain yang identik dengan kaum marginal adalah Raï, yang tumbuh dari konteks lokaal Aljazair. Jenis musik ini hadir dan berkembang di Prancis karena 3 (tiga) faktor: dari generasi muda kaum imigran di Prancis, komunitas siar di radio (Radio Beur dan Radio Soleil di Paris, Radio Galère dan Radio Gazelle di Marseilles), serta produksi massa melalui penjualan kaset). Irama Raï sederhana dan melodius, lirik-liriknya singkat dan kadang diulang oleh suara latar serta kadang mengambil tema dari kemiskinan dan rasa kehilangan, yang mudah diidentifikasi oleh penggemarnya dari pengalaman mereka sendiri. Raï, sebagai musik tradisional Aljazair, mengandalkan kontak dari penyanyinya dengan

publiknya: secara emosional, fisik (awalnya merupakan musik tari), dan juga finansial (penyanyi Raï mengandalkan sumbangan publiknya untuk bertahan). Bentuk internasional dari jenis musik ini tumbuh dari generasi baru penyanyi Raï, generasi muda yang menggabungkan pengetahuan tentang musik Barat dengan Raï tradisional serta memasukkan unsur instrumen baru. Hasilnya adalah bentuk Pop-Raï yang mencatat sukses fenomenal di Aljazair pada awal 1980-an di kalangan remaja urban yang termarginalisasikan secara sosial, politik, dan ekonomi. Di Prancis, kesuksesan Khaled memperlihatkan bahwa musik ini tidak hanya digemari oleh kaum remaja. Single penyanyi tersebut, *Didi*, menjadi satu-satunya lagu berbahasa Arab yang masuk dalam *top charts* Prancis selama beberapa saat.¹¹ Album keduanya, *N'ssi n'ssi* (Februari 1993), meskipun tidak mencatat sukses komersial, memenangkan penghargaan César untuk lagu tema terbaik dalam film 1-2-3 *Soleil*. Sukses dan penghargaan yang diraih Khaled memperlihatkan penerimaan masyarakat budaya Prancis terhadap jenis musik alternatif.

⁹ Warne, Chris. "The Impact of World Music in France", in *Post-Colonial Cultures in France*, 1997.

Penutup

Tradisi monarki yang kuat dengan hak-hak istimewa bagi segolongan orang, seperti yang tercatat dalam sejarah Prancis, telah menumbuhkan ingatan kolektif masa lampau pada diri rakyat Prancis akan arti pentingnya nasionalisme dan patriotisme. Pada gilirannya, hal ini menjadi semacam pembenaran bagi pembelaan terhadap segala sesuatu yang dianggap dapat mengancam identitas nasional, khususnya bagi para sim-

patisan republikan. Salah satunya adalah etnisitas dan keberagamannya, yang sulit untuk hidup dan bertahan di Prancis, termasuk dan terutama etnis kaum pendatang serta budaya asalnya. Hal ini menjadi kendala bagi terciptanya multikulturalisme di negara itu, meskipun sebagai warga negara, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sementara itu, dalam karya seni, ideologi multikultural terlihat amat mewarnai sebagian besar bentuk seni. □

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Barker, Chris, *Cultural Studies Teori & Praktik* (terj. Nurhadi), Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2004.
- Borne, Dominique, *Histoire de la société française depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 1992.
- Cabin, Philippe & J-F. Dortier (coord.), *La Sociologie. Histories et Idées*, Sciences Humaines Éditions, 2000.
- Forbes, Jill & M. Kelly (ed.), *French Cultural Studies an introduction*, Oxford University Press, 1995.
- Hargreaves, Alec G. & Mark McKinney (ed.), *Post-Colonial Cultures in France*, London & New York, Routledge, 1997.
- Liliweri, Alo, Prof. Dr, *Prasangka dan Konflik : Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Mendras, Henri & Alistair Cole, *Social change in modern France: Towards a cultural anthropology of the Fifth Republic*, Cambridge Univ. Press, 2000.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods, Qualitatives and Quantitatives Approaches*, Boston, Allyn and Bacon, 1997.
- Otayek, René. *Le Débat français sur la Citoyenneté et Ses Implications en terme de Perception de l'Autre*. Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux Centre d'Etudes d'Afrique Noire.
- Ruano-Borbalan, Jean-Claude (coord.), *L'histoire aujourd'hui*, Paris, Presses universitaires de France, 1999.
- Sardar, Ziauddin, *Introducing Cultural Studies*, United Kingdom, 1999.
- Tjahjani, Joesana, "Perubahan Sosial-Budaya pada Era *Trente Glorieuses* di Prancis" dalam *Prancis dan Kita : Strukturalisme, Sejarah, Politik, Film, dan Bahasa*, Jakarta, Penerbit Wedatama Widya Sastra, 2003.
- Tjahjani, Joesana, *Monsieur Ibrahim, Dongeng Negeri Multikultural*, makalah disajikan dalam Seminar Gelar Sastra Dunia, FIB UI, Juli 2005.